

Panggung Politik Kiai di Era Pemilukada

Rudi Subiyakto¹

Abstrak: *era pemilihan kepala daerah langsung, Kiai sebagai elit lokal mempunyai nilai yang sangat berarti bagi calon pemimpin daerah. Dengan basis massa riil, Kiai dengan simbol-simbol agama merupakan modal yang signifikan dalam mendulang suara menuju kemenangan, terutama dalam rangka memobilisasi massa. Hal ini dikarenakan salah satu tugas pokok dalam rekrutmen politik adalah bagaimana elit yang ada dapat menyediakan kader-kader parpol berkualitas untuk duduk, terutama di kursi eksekutif maupun legislatif. Tarik-menarik kepentingan antara kandidat dan Kiai menjadi hal yang wajar. Kiai, dengan keharismanya mampu memobilisasi massa, sebaliknya kandidat pemimpin daerah mampu memberi berbagai fasilitas kepada Kiai.*

Kata kunci: pemilukada, politik lokal, kepala daerah.

Pendahuluan

Setelah sekian lama bangsa ini terampas arti kebebasannya oleh Orde Baru, munculah gelombang Reformasi dari berbagai elemen masyarakat yang dimotori oleh mahasiswa menuntut perubahan. Kelelahan dan kekecewaan karena penantian yang panjang selama 32 tahun membuahakan harapan baru dengan mundurnya penguasa Orde Baru Soeharto pada 21 Mei 1998, yang dianggap otoritarian dan melumpuhkan demokrasi. Euforia politik pun menggema seantero negeri, sebagai jawaban atas demam semangat reformasi dengan munculnya berbagai macam isu demokrasi mengiringi transformasi politik yang terjadi.

Didasari semangat itulah, maka pada tanggal 29 September 2004 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah final merevisi UU No. 22 Tahun 1999 dan diganti dengan UU No. 32

¹ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau.

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini telah mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dalam Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.²

Hal yang sangat menarik adalah ketika peran Kiai mulai diperhitungkan dalam kancah perpolitikan daerah dengan perannya yang sangat menentukan bagi terpilih tidaknya seorang Kepala Daerah, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, di mana hal ini sangat tidak mungkin ditemukan ketika Orde Baru masih berkuasa. Temuan di lapangan menunjukkan semakin menguatnya pengaruh elit lokal (Kiai) dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pasca- diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999.³

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada tahun 2004 merupakan pemilihan umum untuk pertama kalinya dalam sejarah negara Indonesia yang meletakkan rakyat sebagai komponen penting dalam ikut serta menentukan pimpinan negara. Dengan pemilihan Presiden secara langsung, rakyat Indonesia menaruh harapan besar untuk terwujudnya perubahan kehidupan politik ke arah yang lebih baik.⁴ Terselenggaranya pemilihan Presiden langsung pada tahun 2004 setidaknya telah memberi akses positif pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2005. Yaitu sistem pemilihan Kepada Daerah secara langsung. Pemilihan secara langsung ini merupakan

² Benni Setiawan, Rudi Subiyakto, Udiyo Basuki, *Pilkada dan Investasi Demokrasi* (Yogyakarta: Penerbit Buku Panji, 2006), p. 25.

³ Lihat hasil penelitian *Indonesia Rapid Desentralisation Appraisal* (IRDA) 3 tahun terakhir yang lalu; tahun 2001, 2002, 2003 yang disponsori *The Asia Foundation* mengenai pengelolaan pemerintahan daerah di berbagai Kota/Kabupaten di Indonesia bahwa pelaksanaan *Good Governance* (di Indonesia di mulai sejak diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 menemukan hambatan-hambatan baik secara struktural maupun kultural.

⁴ Bambang Purwoko, *Demokrasi Mencari Bentuk, Analisis Politik Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: PLOD Universitas Gadjah Mada, 2006), p. 98.

jawaban atas penantian terhadap sistem demokrasi di Indonesia, dan merupakan bukti semakin dewasanya masyarakat dalam berpolitik. Demokrasi yang dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat mulai kelihatan titik wujudnya. *Government of the people by the people and for the people*, seperti disampaikan Lincoln dalam Markoff⁵

AAGN Ari Dwipayana dan Wawan Mas'udi menyatakan, demokrasi secara klasik (substantif) dapat dimaknai sebagai kehendak rakyat (*the will of the people*) atau dimaknai sebagai kebaikan bersama dan kebajikan publik (*the common good*) sebagai tujuan.⁶ Partisipasi sebagai salah satu pilar penting dari demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, berarti dalam rangka pemilihan Kepala Daerah, secara tidak langsung telah memberikan otonomi kepada rakyat untuk menentukan pemerintahan sendiri yang dimaknai sebagai demokratisasi di aras lokal.

Dalam proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung, Kiai yang merupakan bagian dari rakyat mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Mereka mempunyai kemampuan untuk memainkan peran dan pengaruhnya karena mempunyai keunggulan-keunggulan yang melekat pada dirinya, mereka dapat mengelola dan mengendalikan cabang kehidupan tertentu, dimana pada gilirannya yang bersangkutan akan dapat memainkan peran dan pengaruhnya tersebut untuk menentukan corak dan arah bergulirnya roda kehidupan.⁷ Mereka adalah kelompok minoritas superior yang posisinya berada pada puncak strata sosial, mampu mengendalikan aktivitas perekonomian serta

⁵ John Markoff, *Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Sosial dan Perubahan Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), p. 29.

⁶ AAGN Ari Dwipayana dan Wawan Mas'udi, dalam penyampaian mata kuliah Teori Politik, PLOD Universitas Gadjah Mada, 2007.

⁷ Haryanto, *Kekuasaan Elit, Suatu Babasan Pengantar*, (Yogyakarta: PLOD Universitas Gadjah Mada, 2005), p. 63.

sangat dominan mempengaruhi proses pengambilan keputusan.⁸ Meskipun berjumlah lebih sedikit, mereka dengan keunggulan–keunggulan yang dimilikinya dapat memerintah atau memaksa individu–individu lainnya untuk tunduk pada perintahnya.⁹

Keterlibatan para Kiai dalam proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung tidak bisa dihindarkan, karena mereka adalah potensi lokal yang dapat memberikan kontribusi atau memberi warna tersendiri bagi perpolitikan di tingkat daerah. Dengan kemampuannya bisa menciptakan kondisi politik yang kondusif di mana peran mereka sangat menentukan dalam menciptakan rakyat yang partisipatif. Keterlibatan dalam penggalangan massa misalnya, mereka mempunyai kemampuan masing–masing. Kiai dengan karismanya mampu menggerakkan kesadaran masyarakat dalam menentukan pilihan. Hal ini dikarenakan, pola hubungan kiai dan santri yang sangat erat, merupakan faktor penting dan berpengaruh dalam menentukan pilihan politik. Hal ini juga didasarkan pada fakta hubungan santri dan kiai tidak hanya terbatas pada saat berada dalam dunia pesantren. Keberlangsungan hubungan santri dan kiai terus berjalan tidak pernah mengalami keterputusan, bahkan setelah santri pulang ke rumah dan sudah memiliki pesantren sendiri pun hubungan santri dan kiai tidak akan pernah putus.¹⁰

Dengan demikian, Kiai adalah agen perubahan yang sangat potensial, terutama dalam menjembatani kemauan pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Mereka selain menjadi individu yang merdeka juga berperan sebagai *shadow player* untuk mempengaruhi kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat ketika kandidat yang didukungnya dalam posisi menang. Dalam aktivitas Kiai, misalnya, pandangan Kiai

⁸ Sunyoto Usman, “Struktur Interaksi Kelompok Elit dalam Pembangunan: Penelitian di Tiga Desa Santri”, *Prisma*, LP3ES, No 6, Juni 1991, p. 27.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Khoiro Ummatin, *Perilaku Politik Kiai* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), p. 79-80.

dalam aktivitas politiknya, adalah memperjuangkan kepentingan dan sebagai kemaslahatan umat melalui kekuasaan.¹¹

Kiai sebagai elit lokal mempunyai karakteristik tersendiri dalam memberikan dukungan. Kiai dengan masa yang sangat hormat kepadanya. Sebagai imbalan atas jerih payah Kiai, Kepala Daerah (Bupati atau Wakil Bupati) akan memberikan berbagai macam fasilitas, sehingga hal ini akan menimbulkan dampak dalam realitas politik yang ada. Implikasi terhadap pilihan politik rakyat yang sudah dipengaruhi oleh berbagai macam *iming-iming*, tidaklah lagi otonom karena hak yang seharusnya lebih banyak dimanfaatkan oleh rakyat sebagai cermin dari kedaulatan sudah teracuni berbagai kepentingan materi dan kekuasaan. Maka tidak aneh jika Endang Turmudzi menyatakan, adanya perselingkuan kiai dan kekuasaan.¹²

Dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung Kiai sangat berarti bagi calon pemimpin daerah. Kiai dengan basis massa riil akan menjadi modal yang sangat signifikan dalam mendulang suara dan kemenangan. Pendek kata, keberadaan Kiai yang mempunyai basis keelitan tersendiri sangatlah diperlukan dalam rangka penggalangan dana ataupun mobilisasi massa. Hal ini dikarenakan, salah satu tugas pokok dalam rekrutmen politik adalah bagaimana elite politik (dalam hal ini Kiai) yang ada dapat menyediakan kader-kader parpol yang berkualitas untuk duduk di legislatif maupun eksekutif.¹³

Tarik menarik “kepentingan” antara kandidat dengan Kiai menjadi hal yang wajar. Hal ini dikarenakan, posisi Kiai sangat menentukan keberhasilan seorang calon Kepala Daerah. Kiai dengan karismanya mampu memobilisasi massa dalam rangka penggalangan massa dalam kampanye. William Chang,

¹¹ Ridlwan Nasir, “Pengantar”, Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), p. vi.

¹² Baca lebih lanjut, Endang Turmudzi, *Perselingkuan Kiai dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2004).

¹³ Agus Pramono, *Elit Poilitik yang Loyo, dan Harapan Masa Depan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), p. 30.

menulis keterlibatan dalam dunia politik tidak boleh hanya didominasi oleh “elit politik” kelas tinggi, sementara rakyat kelas terbawah dan menengah disingkirkan. Ketakmerataan dalam keterlibatan ini akan menimbulkan instabilitas sosial dalam sebuah negara.¹⁴ Hal inilah yang sebenarnya menjadi arah kebijakan (baca: tugas) Kiai dalam dukungannya.

Jika dahulu Kiai hanya dapat memainkan peran dalam hal memberikan restu kepada calon (karena dipilih melalui DPRD), sekarang Kiai dapat secara leluasa memberikan “restu” kepada calon secara langsung (karena dipilih langsung oleh masyarakat). Kekuatan Kiai dalam pemenangan pilkada terletak pada simbol keagamaan di dalamnya. Kiai sebagai pemimpin pesantren menggunakan simbol-simbol keagamaan dalam sebagai sarana meraih kekuasaan.

Penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam memperoleh kekuasaan menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan, agama tidak selalu bermakna tunggal. Agama mempunyai banyak wajah, sehingga kekuatan simbol-simbol keagamaan akan mampu menggerakkan seseorang dalam menentukan pilihannya. Pendek kata, simbol-simbol keagamaan akan tetap menjadi penuntun “keselamatan” seseorang dalam menentukan pilihan politik.

Simbol-simbol keagamaan inilah yang kemudian menjadi basis kekuasaan Kiai. Selain itu posisi Kiai juga didukung oleh sifat taqlid (meniru) yang sejalan dengan sistem nilai Jawa yang menganut paternalisme dan hubungan *patron client*.¹⁵ Sedangkan dalam hubungannya dengan pusat-pusat kekuasaan dan elit politik, polaritas di tingkat lokal dan otoritasnya di lingkungan pesantren memberikan kepada Kiai nilai tawar menawar

¹⁴ William Chang, *Kerikil-kerikil di Jalan Reformasi, Catatan-catatan dari Sudut Etika Sosial* (Jakarta: Kompas, 2002), p. 105.

¹⁵ Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren, Perbelatan Agama dan Tradisi* (Yogyakarta: LKiS, 2004), p. 53.

(bargaining) yang signifikan.¹⁶ Tulisan ini hendak mengkaji bagaimana peranan Kiai dalam menggunakan simbol-simbol agama dalam suksesi kepemimpinan di era pemilukada.

Kiai, Politik dan Pemilukada

Dalam karir politik, Kiai yang secara turun-temurun merupakan sesuatu yang fenomenal, di mana dalam praktiknya ia selalu menggunakan teori uang logam dengan menggunakan situasi yang mendua, dengan kemampuannya yang ia peroleh dari tradisi yang sangat kuat dan mapan di lingkungan Pondok Pesantren. Ia memanfaatkan keadaan yang mendorong masyarakat untuk menempatkan sebagai seorang tokoh agama yang dikultuskan.

Secara historis Kiai pesantren dalam proses sosial politik memiliki posisi sangat strategis dan memainkan peran penting dalam setiap perubahan. Keterlibatan Kiai pesantren tidak hanya terbatas dalam perkembangan keagamaan, sosial dan kultural saja, di luar itu Kiai pesantren juga ikut terlibat intens dalam perkembangan proses politik sejak Indonesia belum merdeka, masa kemerdekaan dan sampai masa pembangunan sekarang ini.¹⁷ Didorong kenyataan bahwa dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara agama dan arena politik menimbulkan sikap Kiai melebarkan pengaruhnya dengan memanfaatkan peran gandanya secara luas.

Menurut Khoiro Ummatin, kemampuan dan kemauan Kiai pesantren terlibat dalam berbagai persoalan, termasuk persoalan politik dapat mencapai posisi strategis karena adanya tiga pilar penting yang menjadi penopang, yaitu potensi internal Kiai (kemampuan dan garis keturunan), kuatnya jaringan sosial

¹⁶ Pradjarta Dirjosanjoto, *Memelihara Umat, Kiai Pesantren, Kiai Langgar di Jawa* (Yogyakarta: LKiS, 1999), p. 45.

¹⁷ Khoiro Ummatin, *Perilaku Politik Kiai*, p. 116.

organisasi NU dan jaringan sosial yang dibangun tradisi pesantren.¹⁸

Karir politik Kiai saat ini bukanlah hal yang baru. Keterlibatan Kiai dalam permainan politik sudah ada sejak zaman pra-kemerdekaan. Jika pada zaman pra-kemerdekaan mereka meneriakkan kemerdekaan melalui pesantren (pendidikan), lobi kultural dan perang melawan penjajahan, maka, pasca-kemerdekaan mereka terjun ke dunia politik melalui partai politik. Hal ini dapat dilihat pada pemilu pertama tahun 1955 sampai pemilu terakhir tahun 2004 yang lalu. Panggung politik nasional selalu diramaikan dengan para Kiai yang *wira-wiri* masuk dalam partai politik. Hal ini tentunya semakin menambah meriah pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia. Hal ini dikarenakan, Kiai memiliki pengikut yang setia seperti *fans* dalam dunia infotainment. Lebih lanjut, kharisma Kiai selalu dapat menarik simpati konstituen, karena mereka dianggap orang suci dan doanya selalu makbul (diterima) oleh Tuhan.

Menurut Bambang Purwoko¹⁹, setidaknya ada tiga periode pentas politik elit agama (Kiai) dalam percaturan perpolitikan nasional. Pertama, adalah periode 1945 sampai dengan periode tahun 1965, ketika para politisi dengan basis agama masih bisa berkiprah secara relatif bebas dalam perpolitikan nasional. Dalam periode ini para elit agama (Kiai) yang menjadi politisi—selanjutnya disebut sebagai politisi Islam--bisa menjadi pelaku aktif atau subyek dari permainan politik Indonesia.

Kedua, adalah masa-masa dimana politisi Islam lebih berperan sebagai obyek yang dibelenggu oleh sistem maupun rezim pemerintahan otoriter Orde Baru yang menganggap

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Bambang Purwoko, "Perilaku Politik Elit Agama dalam Dinamika Politik Lokal", dalam *Focus Groups Discussion: Perilaku Elit Politik dan Elit Agama dalam Pilkada di Kabupaten Kulonprogo*, diselenggarakan oleh LABDA Shalahuddin, JPPR, dan The Asia Foundation, Yogyakarta, 3 Agustus 2006. p. 2.

kekuatan Islam sebagai musuh besar negara dan karena itu para elitnya harus dikooptasi sedemikian rupa sehingga bisa meminimalisir semua potensi perlawanan dan pembangkangan terhadap dominasi negara. Periode kedua ini berlangsung cukup lama, biasanya dikenal dengan 32 tahun masa kejayaan Orde Baru antara tahun 1966 sampai dengan 1998.

Ketiga, adalah periode antara tahun 1998-2006 ini yang ditandai dengan kembalinya kebebasan untuk mengekspresikan hak-hak politik warga negara termasuk ekspresi politik para elit Islam. Dalam kurun waktu yang cukup pendek sejak tahun 1998 kita telah menyaksikan sedemikian banyak peristiwa politik yang melibatkan para politisi Islam dari berbagai jenis massa. Selama periode ketiga ini pula kita menyaksikan perilaku dan wajah politik yang ternyata tidak tunggal, ada yang bopeng tetapi banyak juga yang mulus.

Pengertian Kiai pun dari hari ke hari semakin berkembang. Kiai adalah bukan seorang yang hanya memimpin pesantren, tetapi Kiai adalah orang yang mempunyai pesantren.²⁰ Pengertian dimaksudkan untuk melakukan pembaruan dalam bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan, pendidikan dilakukan tidak hanya di sekolah-sekolah umum yang dikelola pemerintah saja, melainkan pendidikan juga dilakukan di dalam pesantren. Maka, pengertian Kiai harus memiliki pesantren dimaksudkan untuk pembaruan dan atau pola interkasi masyarakat, pemerintah dalam proses pendidikan.

Lebih lanjut Mukti Ali²¹ berpandangan bahwa dalam kehidupan pesantren, Kiai adalah seseorang yang sangat disegani oleh santri-santrinya. Hal ini dikarenakan, Kiai selalu memperhatikan santrinya sehingga menimbulkan hubungan yang akrab antara santri dan Kiai. Keadaan ini berimbas pada pandangan bahwa, menentang Kiai selain dianggap kurang sopan juga bertentangan dengan ajaran agama.

²⁰ A. Mukti Ali, *Metode Memahami Agama Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), p. 9.

²¹ *Ibid.*, p. 6.

Kiai juga berarti elit agama. Ia memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengajarkan ilmu agama Islam kepada masyarakat. Elit agama adalah para pemimpin atau tokoh agama yang memimpin suatu komunitas keagamaan tertentu baik dengan basis organisasi sosial kemasyarakatan maupun basis sosial-kependidikan. Elit agama bisa terdiri dari para pemimpin organisasi keagamaan (misalnya yang paling besar adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) maupun para tokoh agama (Kiai, Ustadz, Ustadzah) yang memimpin Pondok Pesantren atau memiliki basis massa keagamaan yang kuat walaupun mungkin tidak secara langsung berafiliasi dengan organisasi keagamaan tertentu.²²

Andree Feillard mendefinisikan Kiai dalam makna spesifik sebagai seorang dengan kapasitas keilmuan agama yang tidak diragukan lagi, kini telah mengalami pergeseran posisi. Feillard menyatakan bahwa sekarang kata Kiai memang masih digunakan oleh masyarakat sebagai ekspresi rasa hormat. Namun demikian, kata Kiai telah mengalami disorientasi, karena masih banyak diantara mereka yang belum masuk kriteria untuk disebut sebagai Kiai, ternyata telah menyandang gelar Kiai. Misalnya, orang muda yang belum tentu mempunyai pengetahuan agama yang benar.²³

Dari beberapa pengertian Kiai tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Kiai adalah seorang yang menjadi panutan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan ia memiliki pemahaman lebih mengenai agama Islam dan mengajarkannya kepada masyarakat baik dalam lingkungan umum maupun di dalam pesantren. Kiai juga berarti seseorang yang mempunyai pengaruh dalam lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan, Kiai mempunyai pendukung yang fanatik dan selalu dihormati oleh

²² Bambang Purwoko, "Perilaku Politik Elit Agama dalam Dinamika Politik Lokal", dalam *Focus Groups Discussion*, p. 1.

²³ Andree Feillard, *NU Via-a-Vis Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1999), p. 356.

siapapun, karena bertindak tidak sopan kepada Kiai berarti berani menentang ajaran agama.

Pengertian di atas menunjukkan betapa terhormatnya Kiai dalam pandangan masyarakat. Masyarakat selalu menyimak dan mengikuti seluruh petuahnya. Hal ini dikarenakan, Kiai dianggap orang suci (maksud) yang selalu benar apa yang dikatakannya.

Fenomena pertama oleh Aswab Mahasin²⁴, disebut sebagai *priyayisasi santri*, yakni proses perubahan kelompok santri dari lingkungan tradisional memasuki kehidupan birokrasi dan ekonomi modern, tepatnya “pemborjuisan” anak-anak kaum santri. Pada saat yang sama terjadi fenomena *santrinisasi priyayi*, yakni meluasnya penggunaan atribut keagamaan kedalam kehidupan keluarga priyayi. Tetapi, sejumlah karakter yang dipandang Jawa seperti *perilaku santun, trima, sabar dan ikhlas* sebenarnya mewarnai ketiga figur di atas. Kelompok priyayi menekankan semua ini sebagai perwujudan dari sikap *manunggaling kawula lan gusti*, pasrah dan mengikuti kehendak dari *Gusti Pangeran*. Sedangkan Kiai tidak berperilaku secara khusus untuk berdakwah, tetapi lebih untuk membangun hubungan *habluminan nas*, selain *habluminallah*, seperti yang diajarkan dalam Islam. Kata *Gusti Pangeran* mewakili personifikasi dari yang maha luar biasa dan berkuasa atas diri manusia. Kata ini sebutan lain dari Allah s.w.t, bagi orang Jawa.

Dengan demikian, Kiai mempunyai peran khusus dalam pendidikan politik masyarakat. Hal ini nampak dari pola atau pergeseran kelas sosial ala Geertz. Kaum Santi (Kiai) banyak memasuki wilayah politik (kekuasaan) yang selama ini menjadi identitas kaum priyayi. Walaupun tidak secara khusus Kiai

²⁴ Aswab Mahasin, “Kelas Menengah Santri: Pandangan dari Dalam”, dalam Richard Tanter dan Kenneth Young, *Politik Kelas Menengah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1993), p. 153. Baca juga, Azyumardi Azra, “Kesalehan Priyayi Jawa: Perspektif Kekuasaan” *Pengantar* dalam Zainuddin Maliki, *Agama Priyayi Makna Agama di Tangan Elite Penguasa* (Yogyakarta: Pustaka Marwah, 2004), p. xv.

bermain atau memasuki wilayah politik, ia menjadi bagian tak terpisahkan dari proses dukungan calon pemimpin politik (dalam penelitian ini calon Kepala Daerah).

Realitas Politik Lokal

Menurut Bambang Purwoko²⁵, digelarnya model pemilihan Kepala Daerah secara langsung membawa dampak yang cukup serius terhadap perilaku politik di tingkat lokal. Para aktor politik lokal tiba-tiba mendapatkan arena bermain yang cukup luas untuk menyalurkan bakat-bakat politik mereka secara bebas. Tentu saja banyak yang teragap dengan perubahan mendadak ini. Elit agama (Kiai) termasuk kelompok yang relatif belum siap menyikapi terbukanya kesempatan politik di tingkat lokal ini. Tampilnya para kandidat calon Kepala Daerah dalam arena pilkada langsung mau tidak mau harus menyeret dukungan dari berbagai kekuatan yang memiliki basis massa yang kuat. Organisasi sosial keagamaan adalah lahan potensial yang menjadi lahan rebutan para kandidat Kepala Daerah (Bupati, Walikota atau pun Gubernur).

Realitas politik ini benar-benar disambut dengan penuh kegagapan dan kebingungan oleh para elit agama di tingkat lokal. Terjadinya pola-pola koalisi yang melibatkan kekuatan politik dengan ideologi yang sangat berbeda mencerminkan ketidaksiapan elit lokal dalam menyikapi berlangsungnya model pemilihan langsung ini. Demikian juga mengalirnya dukungan elit agama terhadap para kandidat tertentu yang tidak bersinggungan dengan basis keagamaan mereka, memperlihatkan betapa lemahnya dan *fragile*-nya pemahaman elit agama terhadap posisi strategis mereka sebagai aktor politik di tingkat lokal.

Kiai seringkali hanya dimanfaatkan oleh calon kepala daerah guna meraih suara saja. Kiai juga menjadi dijadikan alat legitimasi atas segala tindakan yang dilakukan oleh calon kepada

²⁵ Bambang Purwoko, "Perilaku Politik Elit", p. 3.

daerah. Kiai seringkali tidak berdaya melawan “kehendak” calon. Hal tersebut setidaknya telah mendistorsi makna Kiai sebagai pemimpin masyarakat. Kiai lebih sebagai “budak” calon kepala daerah. Ia tidak mempunyai kemandirian untuk bersuara.

Maka tidak aneh jika sekarang ini banyak Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Gubernur/Wakil Gubernur terperangkap dalam jebakan korupsi. Setidaknya ada 148 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Walaupun Kementerian Dalam Negeri menyatakan korupsi tersebut lebih bersifat administratif, namun hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang telah dijalin secara baik pada masa kampanye tidak berulang ketika seseorang telah menjadi pemimpin daerah.

Lebih dari itu, banyaknya pemimpin daerah yang terjerumus dalam kubangan korupsi menandakan hubungan yang tidak harmonis antara kepemimpinan moral (kiai) dan kepemimpinan politik (Bupati). Setelah hajatan pemilukada usai, semua kembali ke barak, tanpa mau tahu kepentingan dan urusan masing-masing. Kiai kembali mengurus pesantren. Pemimpin daerah mengurus daerah dan mengembalikan modal yang telah ia keluarkan sebagai biaya pemilukada. Tidak ada lagi sistem *check and balance* antara keduanya. Pemimpin daerah meninggalkan Kiai. Sebaliknya, Kiai tidak mau tahu dengan urusan pemimpin daerah.

Sikap Kiai yang tidak mau tahu kalau tidak mau disebut acuh terhadap urusan daerah merupakan salah satu ciri kepemimpinan tradisional. Kiai adalah pemimpin terhormat yang harus selalu “disowani” bukan “sowan” kepada kepala daerah. Sistem seperti ini sudah saatnya direkonstruksi. Memang agak sulit mengubah kultur tersebut. Namun, di tengah kemajuan sistem informasi dan teknologi, globalisasi, dan sistem politik, peran serta Kiai untuk turut serta memikirkan nasib daerah sangat penting. Hal ini karena, kehidupan agama tidak dapat dipisahkan secara nyata nyata dari kehidupan politik.

Penutup

Kegagalan pemerintah daerah yang ditandai oleh banyaknya kepala daerah terseret persoalan korupsi merupakan potret kegagalan kepemimpinan moral Kiai di tengah masyarakat. Apalagi hal ini ditambah oleh “ikut bermainnya” Kiai dalam ajang pemilukada. Walaupun tidak sebagai “pemain inti”, Kiai telah masuk dalam pusaran politik praktis yang kadang kala menghalalkan segala cara guna meraih kemenangan.

Maka dari itu, keputusan Kiai untuk tampil dalam panggung politik daerah harus dibarengi oleh kemauan untuk berani menyuarakan kebenaran. Kiai harus vokal menyuarakan suara rakyat dan mengingatkan kepala daerah untuk tidak korupsi dalam membangun daerah. Hal ini karena, Kiai merupakan simbol kepemimpinan moral masyarakat. Ketika Kiai tidak mampu melaksanakan misi mulia ini, ia akan selamanya menjadi “tameng” kerusakan moral pejabat daerah. Hendaknya disadari, selain sebagai *agent of change*, Kiai juga diharapkan mampu mengejawantahkan *amr ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan politik.

Daftar Pustaka

- Ali, A. Mukti *Metode Memahami Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Berger, Peter L. *Langit Suci, Agama sebagai Realitas Sosial*, terjemahan Hartono, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Chang, William, *Kerikil-kerikil di Jalan Reformasi: Catatan dari Sudut Etika Sosial*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: :LP3ES, 1984.

- Dirjosarjoto, Pradjarta, *Memelihara Ummat, Kiai Pesantren, Kiai Langgar di Jawa*, Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Haryanto, *Kekuasaan Elit: Suatu Babasan Pengantar*, Yogyakarta: PLOD Universitas Gadjah Mada, 2005.
- Markoff, John, *Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Feillard, Andree, *NU Vis-a-Vis Negara*, Yogyakarta; LkiS, 1999.
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.
- _____, *Islam Observed, Religious Development in Morocco and Indonesia*, London: the University of Chicago Press, 1975.
- Huda, Nurul SA, *Cakrawala Pembebasan Agama, Pendidikan dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002.
- Mahasin, Aswab “Kelas Menengah Santri: Pandangan dari Dalam”, dalam Richard Tanter dan Kenneth Young, *Politik Kelas Menengah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1993.
- Maliki, Zainuddin, *Agama Priyayi: Makna Agama di Tangan Elit Penguasa*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.
- Mas’ud, Abdurahman, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*, Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Patoni, Achmad, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Pramono, Agus, *Elit Politik yang Loyo dan Harapan Masa Depan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

- Prihatmoko, Joko J. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan Problema Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dengan LP3M Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2005.
- Purwoko, Bambang “Perilaku Politik Elit Agama dalam Dinamika Politik Lokal”, dalam *Focus Groups Discussion*, “Perilaku Elit Politik dan Elit Agama dalam Pilkada di Kabupaten Kulonprogo”, diselenggarakan oleh LABDA Shalahuddin, JPPR, dan The Asia Foundation, Yogyakarta, 3 Agustus 2006.
- _____, *Demokrasi Mencari Bentuk, Analisis Politik Indonesia Kontemporer*, PLOD Universitas Gadjah Mada, 2006.
- Setiawan, Benni, Rudi Subiyakto, Udiyo Basuki, *Pilkada dan Investasi Demokrasi*, Yogyakarta: Penerbit Buku Panji, 2006.
- Ummatin, Khoiro, *Perilaku Politik Kiai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Usman, Sunyoto “Struktur Interaksi Kelompok Elit dalam Pembangunan: Penelitian di Tiga Desa Santri”, *Prisma*, LP3ES, No 6, Juni 1991.